

Kata Pengantar

Program UN-REDD Indonesia adalah sebuah program inisiatif untuk menjawab Rencana Aksi Bali 2007 dan merupakan kerja sama antara Kementerian Kehutanan Badan Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dan Program Lingkungan PBB (UNEP). Program ini bertujuan untuk membantu dan mendukung Pemerintah Indonesia mengembangkan arsitektur REDD+ secara tepat waktu yang akan memungkinkan pelaksanaan REDD+ secara adil, setara dan transparan, serta untuk mencapai "Kesiapan-REDD".

Untuk mencapai tujuan kesiapan tersebut, ada tiga hasil utama yang akan menjadi tolak ukur, yaitu: 1. Kuatnya keikutsertaan dan konsensus berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional; 2. Contoh penetapan yang sukses tentang Tingkat Emisi Referensi atau (REL), Sistem Pengukuran, Penilaian, Pelaporan dan Verifikasi (MRV) serta sistem pembayaran yang adil berdasarkan arsitektur REDD+ nasional; dan 3. Terbangunnya kapasitas (kecakapan) untuk melaksanakan REDD+ di tingkat kabupaten.

Untuk mencapai hasil-hasil tersebut, Sulawesi Tengah berhasil terpilih sebagai lokasi percontohan berbagai kegiatan Program UN-REDD Indonesia di tingkat provinsi dan kabupaten pada Lokakarya Awal (Inception Workshop) yang dibuka oleh Menteri Kehutanan Indonesia Zulkifli Hasan (30-31/10/2010) di Jakarta.

Program UN-REDD Indonesia mendorong pengembangan prinsip Padiatapa atau Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free Prior and Informed Consent-FPIC) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama yang berhubungan dengan masyarakat lokal.

Prinsip ini diwujudkan dalam kerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam pengembangan Strategi REDD+ Nasional melalui proses konsultasi inklusif dengan berbagai pemangku kepentingan. Sebuah proses yang pertama di dunia.

Pada bulan Desember 2010, Rancangan Stranas REDD+ telah diserahkan kepada Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) untuk kemudian digodok menjadi Stranas REDD+.

Dalam usianya yang singkat, hingga saat ini Program UN-REDD Indonesia telah melakukan cukup banyak kegiatan yang diharapkan, setelah selesai masa kerjanya, berhasil membantu membawa Indonesia mencapai kesiapan untuk melaksanakan REDD+. Dan UN-REDD Indonesia Newsletter ini diterbitkan sebagai sarana penyebarluasan informasi kegiatan UN-REDD Indonesia dan penyadartahuan masyarakat luas tentang isu-isu REDD+.



Selamat membaca.

Yuyu Rahayu
Direktur Proyek Nasional

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Dalam Edisi Ini.....	2
Wamen PPN/BAPPENAS: Stranas REDD+ Cermin Komitmen Pemerintah Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca.....	2
Upaya Papua Menjadi Provinsi Percontohan REDD+	3
Masyarakat Adat Sepakat Laksanakan Padiatapa di Sulawesi Tengah.....	3
Kegiatan Mendatang	6
Mendata Kegiatan Percontohan REDD+ di Indonesia.....	4
Kabar Terbaru Karbon Indonesia	4
Tentang Sulawesi Tengah.....	5
Kata Mereka.....	5
Kabar Program UN-REDD Indonesia.....	6
Publikasi Terbaru	6
Alamat	6

Untuk informasi lebih lanjut tentang **UN-REDD Program** kunjungi: www.un-redd.or.id

Wamen PPN/BAPPENAS: Stranas REDD+ Cermin Komitmen Pemerintah Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

UN-REDD Programme Indonesia mendukung Bappenas mengadakan konsultasi nasional untuk membahas Rancangan Strategi Nasional REDD+ bersama dengan para pemangku kepentingan terkait di kantor Bappenas (10/11).



▲ Para peserta Konsultasi Nasional Stranas REDD+ mendengarkan sambutan yang sedang disampaikan oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo (10/11).

Dalam sambutannya ketika membuka Konsultasi Nasional, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menegaskan bahwa penyusunan Stranas REDD+ mencerminkan komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca. "Selain itu, harapan ke depan adalah pelaksanaan REDD+ tidak saja menurunkan emisi GRK tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia baik secara makro maupun mikro," lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemenhut Hadi Daryanto menekankan pentingnya Stranas REDD+ sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, Sekjen menepis kekhawatiran bahwa penerapan REDD+ di Indonesia akan menghambat laju pembangunan. "Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari masalah perubahan iklim. Sektor kehutanan memiliki tugas untuk menurunkan emisi sebesar 14%, dari 1,5 giga ton menjadi 2,5 giga ton. Dengan menurunkan emisi, kita akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Sejak pertama kali diluncurkan (24/9), UN-REDD Programme Indonesia telah

mendukung serangkaian kegiatan pembahasan dan konsultasi publik Rancangan Stranas REDD+ ke berbagai region di seluruh Indonesia. Konsultasi regional tersebut telah melibatkan para pemangku kepentingan terkait secara transparan dan inklusif di 7 wilayah yang meliputi 32 provinsi.

Rancangan Stranas REDD+ ini juga telah dikonsultasikan dengan berbagai ahli baik nasional maupun internasional di Bali (31/10-3/11).

Keyakinan pemerintah bahwa penerapan REDD+ tidak akan berpengaruh buruk, bahkan sebaliknya, terhadap laju pertumbuhan pembangunan dan ekonomi negara ditegaskan kembali oleh Deputi I UKP4 Heru Prasetyo. Beliau mengatakan bahwa pengurangan emisi tidak berarti melambatnya pertumbuhan ekonomi.

"I don't buy that," tegasnya, sambil mencontohkan Brazil yang berhasil menurunkan tingkat deforestasi dan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonominya antara 6-8 persen. "Saya yakin kita bisa mencapai angka 7/41, 7 persen



▲ UN Resident Coordinator El-Mostafa Benlamih memberikan sambutannya.

pertumbuhan dan 41 persen pengurangan emisi, bahkan lebih," lanjutnya.

Saat ini, Program UN-REDD Indonesia sedang menyelesaikan penyusunan dua buah buku hikmah pembelajaran terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan konsultasi regional dan nasional dalam penyusunan Rancangan Strategi Nasional REDD+. (RR)

Upaya Papua Menjadi Provinsi Percontohan REDD+

Jakarta – UN-REDD Indonesia mendukung Kementerian Kehutanan mengadakan lokakarya sosialisasi tentang proses pemilihan provinsi percontohan di Jayapura, Papua (22/7). Kegiatan pemilihan provinsi percontohan termasuk salah satu keluaran pada tahap pertama dari pelaksanaan kerja sama Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah RI dan Norwegia.

Selain mempercepat pelaksanaan REDD+, kegiatan tersebut juga berfungsi menampung masukan/aspirasi mengenai berbagai kriteria dan indikator pemilihan provinsi percontohan.

Papua merupakan satu dari 9 provinsi yang telah dinominasikan sebagai provinsi percontohan pelaksanaan REDD+.

Provinsi-provinsi lain adalah Jambi, Riau, Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat.

Peserta yang hadir dalam workshop ini berjumlah 91 orang dari unsur Kementerian Kehutanan, Pemprov Papua, perwakilan Pemkab/Pemkot lingkup

Papua, Perguruan Tinggi, Lembaga Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati lingkungan, dan perusahaan swasta (Freeport, APLI Papua, dll). Tim dari Jakarta terdiri dari Ir. Listya Kusumawardhani, Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam (BPHA), Ditjen BPK (Bina Produksi Kehutanan), Yani Septiani dari Sekretariat LOI Kemenhut, Dr. Magdalena Gultom dari Seksi Kerjasama Teknik Ditjen BPK, Ir. Yuyu dan Heri dari Direktorat BPHA didampingi Agus Hernadi dari UN REDD dan Iwan Wibisono dari WWF.

Proses-proses mutipihak dalam lokakarya tersebut telah dilakukan oleh Kemenhut dengan hasil berupa penetapan empat kriteria pemilihan provinsi percontohan pelaksanaan REDD+, yaitu tata kelola

pemerintahan, biofisik hutan, sosial-ekonomi, serta data dan MRV (Monitoring, Reporting and Verification). Kriteria-kriteria tersebut dirumuskan pada sebuah lokakarya nasional (25/6) dan kemudian dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan penetapan provinsi pilot REDD+ selanjutnya.

Dalam diskusi pada lokakarya di Hotel Aston Jayapura tersebut, para peserta pada umumnya beranggapan bahwa kriteria dan indikator yang ada sudah cukup lengkap. Namun beberapa

peserta mengusulkan untuk menyempurnakan indikator-indikator tata kelola dan sosio-ekonomi. Sedangkan mengenai kesiapan sebagai calon provinsi percontohan REDD+, secara umum para peserta beranggapan bahwa Provinsi Papua telah memenuhi semua aspek yang ditetapkan.



▲ Photo Pembukaan Workshop oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, sebelah kiri dan ditengah Ibu Listya Kusumawardhani, Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam (BPHA)

Masyarakat Adat dan LSM Sepakat Akan Laksanakan Padiatapa UN-REDD di Sulteng

PALU, UN-REDD INDONESIA – Sekelompok lembaga swadaya masyarakat bekerja sama mengadakan kegiatan lokakarya untuk merumuskan tata cara memfasilitasi dan melaksanakan Padiatapa (Peretujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau FPIC) di Sulawesi Tengah di Palu, 28-29 Desember 2010.

Lokakarya dua hari ini didukung penuh oleh UN-REDD Indonesia dan dihadiri oleh Kepala Badan Keselamatan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Sulawesi Tengah Safri Kaban tersebut dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Ir.H. Nahardi, MM. Dalam sambutannya, Nahardi menegaskan: "FPIC penting artinya sebagai sebuah instrumen yang menempatkan demokrasi lokal sebagai arena utama pengambilan keputusan." Untuk itu, Nahardi menyampaikan penghargaan kepada UN-REDD Indonesia yang berusaha mengembangkan sebuah mekanisme REDD+ yang inklusif.

Pada hari pertama lokakarya, Hedar Laudjeng, SH dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) memberi penjelasan bahwa sesungguhnya prinsip-prinsip dan pelaksanaan Padiatapa di Indonesia dijamin keberadaannya oleh peraturan dan perundangan. Antara lain, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur bahwa masyarakat berhak mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan.

"Prinsip utama dari Padiatapa adalah bebas dari tekanan. Perlambatan penyampaian informasi ke masyarakat merupakan penyimpangan dari UU ini," tegasnya.

Berbagai perwakilan masyarakat adat, LSM, akademisi hingga pemerintah berdiskusi tentang Padiatapa REDD+. Masyarakat adat,

misalnya, menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan penguatan kelompok mereka agar dapat memahami substansi dan skema kerja Padiatapa dan REDD+. Dengan demikian diharapkan masyarakat adat akan memiliki informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan dan supaya keterlibatan mereka dapat berjalan efektif.

Selain itu diperlukan kelompok-kelompok kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah yang tugas utamanya adalah menyusun strategi daerah tentang REDD+ serta melengkapi profil masyarakat adat – mulai dari sejarah, wilayah, lembaga, hukum, hingga kearifan lokal.

Gagasan pembentukan pokja tersebut ditanggapi oleh Dr. Machfud dari UN-REDD Indonesia yang menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah memang telah merencanakan pembentukan pokja REDD+. Untuk itu, ia mengingatkan, para pemangku kepentingan harus menyiapkan perwakilan mereka dalam pokja yang nanti akan dibentuk oleh pemerintah daerah tersebut.

Di hari terakhir lokakarya, para peserta berhasil menyepakati nama-nama yang duduk sebagai wakil mereka dalam protokol komunikasi yang akan bertanggung jawab menyebarkan informasi dari pusat kepada mereka. (RR)

Kegiatan Mendatang

PMU Retreat

7-8 Januari 2011, Bandung

Pertemuan Project Executive Board

12 Januari 2011, Jakarta

Lokakarya Padiatapa (FPIC) Nasional

11-12 Januari 2011, Jakarta

Presentasi Hasil COP16 Cancun

14 Januari 2011, Jakarta

Lokakarya Padiatapa Masyarakat Adat dan LSM Berperspektif Gender

19-20 Januari 2011, Sigi, Sulteng

FGD FPIC Policy Development

21 Januari 2011, Bogor

Lokakarya Penyusunan Tupoksi Keanggotaan Pokja

8 Februari 2011, Palu, Sulteng

Media Gathering

9 Februari 2011, Palu, Sulteng

Seri Pertemuan Pembahasan Forestry Roadmap

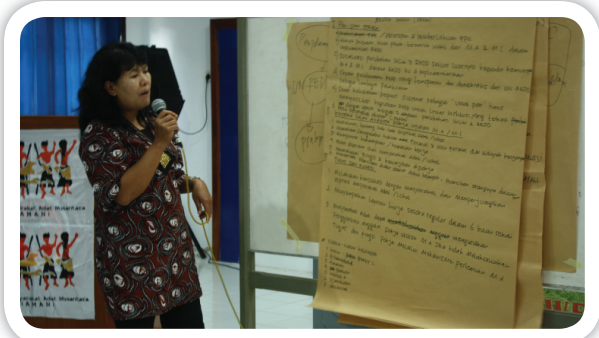
11 Februari 2011, Yogyakarta

Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Pokja

14 Februari 2011, Palu, Sulteng

Seri Pertemuan Pembahasan Forestry Roadmap

17 Februari 2011, Bogor



Mendata Kegiatan Percontohan REDD+ di Indonesia

Menjelang akhir tahun 2010, Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kemhut mengadakan lokakarya untuk mengidentifikasi dan meninjau status kegiatan-kegiatan percontohan REDD+ di Indonesia. Lokakarya satu hari (21/12) yang dibuka oleh Sekjen Kemhut Hadi Daryanto tersebut diharapkan dapat mengembangkan pendekatan paling tepat untuk mengelola kegiatan-kegiatan percontohan REDD+ selama tahap kesiapan dan tahap-tahap selanjutnya.



▲ Para narasumber, dari kiri ke kanan: NPD UN-REDD Programme Indonesia Yuyu Rahayu, Sekretaris Jenderal Kemhut Hadi Daryanto, dan Kepala Pustanling Nur Masripatin.

Sekitar 100 peserta dari kalangan pemerintah, donor, swasta, akademisi, LSM, media, dan berbagai masyarakat sipil hadir untuk berbagi pengalaman mereka mengelola kegiatan percontohan REDD+ di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk UN-REDD Indonesia yang juga ikut mendukung acara tersebut.

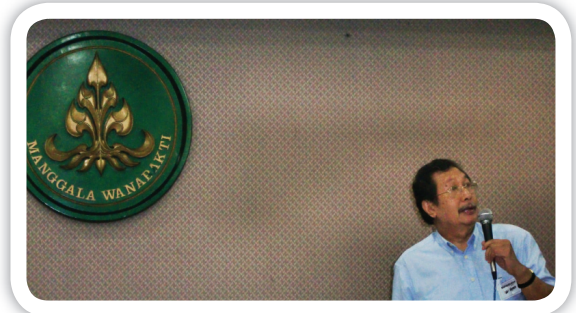
Dalam sesi pleno pertama, fasilitator Taufik Alimi berhasil mengerucutkan beberapa temuan dari hasil paparan dan diskusi singkat para peserta. Pertama, bentuk kegiatan yang secara umum dapat dibagi berbasis pendanaan (fund based), yang umumnya berbentuk kerja sama bilateral Indonesia dengan negara mitra, dan yang berbasis pasar (market based).

Temuan berikutnya adalah tantangan-tantangan yang harus diantisipasi. Pertama, metodologi yang terus berubah dan penerimaan pasar. Kedua, peraturan dan tata pemerintahan, yang terkait dengan perizinan, termasuk untuk perdagangan karbon,

distribusi manfaat dan tumpang tindihnya kawasan, serta kelembagaan. Terakhir, safeguard atau rambu-rambu yang dibutuhkan dalam melibatkan masyarakat.

Diskusi yang berjalan dinamis berhasil mengangkat persamaan dan perbedaan di antara para peserta yang berasal dari kelompok berbeda. Semua sepakat, misalnya, akan perlunya segera dibuat peraturan mengenai distribusi manfaat atau insentif serta perlunya mekanisme keuangan yang jelas tentang siapa penerimanya.

Sedangkan dalam menghadapi tantangan metodologi, para peserta memiliki perbedaan penekanan dalam pengembangan metodologi seperti MRV dan REL. Para peserta dari kamar pemerintah melihat perlunya kepemimpinan yang kuat dari pemerintah dan fokus pada kelembagaan MRV dan REL. Sedangkan kamar swasta lebih menekankan perlunya



▲ Hermawan Indrabudi, Team Leader REDD Methodology memaparkan perkembangan terakhir dan rencana kegiatan di daerah percontohan UN-REDD Indonesia di Sulawesi Tengah (21/12).

mekanisme penetapan metode antara penjual dan pembeli yang mematuhi IPCC serta lebih rinci agar semakin diterima pasar.

Kabar Terbaru Karbon Indonesia

Menutup tahun 2010, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mengadakan lokakarya untuk menyampaikan berbagai perkembangan terakhir karbon di Indonesia selama tiga hari di Hotel Aryaduta, Jakarta (20-22/12).



Berbagai perkembangan disampaikan dalam lokakarya yang dibuka oleh Heru Prasetyo, Sekretaris Satgas REDD+ tersebut, seperti negosiasi global tentang perubahan iklim dan prakarsa dan kemajuan yang sedang berjalan dalam tindakan mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Selain itu lokakarya tersebut juga menjadi ajang bagi para peserta yang berasal dari berbagai kalangan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, termasuk bertemu dengan para investor dan pengembang proyek pelaksanaan prakarsa karbon tanah.

UN-REDD Indonesia ikut memfasilitasi kegiatan Indonesian Carbon Update 2010 ini karena melihat arti strategis dari kegiatan yang rencananya akan dilakukan setiap tahun ini. Indonesian Carbon Update tidak

hanya dapat dijadikan sarana berbagi hikmah pembelajaran, tapi juga untuk menyampaikan banyak kegiatan yang telah dilaksanakan UN-REDD Indonesia meskipun masih seumur jagung.

Pada sesi pertama, Direktur Proyek Nasional UN-REDD Indonesia Yuyu Rahayu menyampaikan perkembangan termutakhir REDD+ baik secara global, nasional maupun sub-nasional khususnya berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan UN-REDD Indonesia. Ini termasuk memfasilitasi konsultasi regional hingga nasional penyusunan Stranas REDD+, serta meluncurkan Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan kegiatan UN-REDD Indonesia.

Pada hari kedua lokakarya diluncurkan Indonesia Carbon Update Network (ICU-Net)

yang dapat diakses pada tautan berikut <http://indonesiacarbonupdate.net>. (RR)



▲ Para panelis dalam sesi pertama Indonesia Carbon Update 2010 (20/12). Nomor dua dari kiri: Yuyu Rahayu, Direktur Proyek Nasional UN-REDD Programme Indonesia. (Foto: DNPI)

Tentang Sulawesi Tengah Peluncuran Sulawesi Tengah Sebagai Provinsi Percontohan

Terdapat tiga tahap untuk melaksanakan REDD+, yaitu persiapan, kesiapan (REDD+ Readiness), dan pelaksanaan. Tahap persiapan di Indonesia telah dilakukan tahun 2008-2009, sementara tahap kesiapan dilaksanakan antara tahun 2010 dan 2012, dengan kegiatan percontohan pelaksanaan REDD+ di berbagai lokasi (demonstration activities/DA di tingkat proyek).

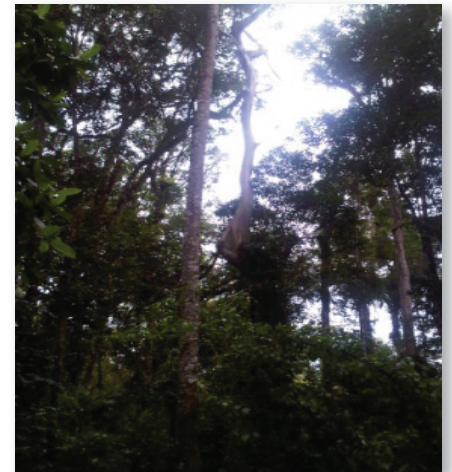


▲ Gubernur Sulawesi Tengah H. B. Paliudju memukul gong sebagai tanda peresmian Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan program UN-REDD Indonesia, dengan disaksikan oleh UN Resident Coordinator El-Mostafa Benlamih dan Garry Lewis dari UNODC (13/10).

Provinsi Percontohan (Pilot Province) UN-REDD Indonesia adalah Sulawesi Tengah. Penetapan ini telah mempertimbangkan beberapa kriteria seleksi, di antaranya: tingkat deforestasi, potensi kepadatan karbon, dan dukungan politis di daerah tersebut. Dengan terpilihnya Sulawesi Tengah sebagai provinsi demonstrasi, UN-REDD Programme Indonesia melakukan berbagai kegiatan untuk membangun dan menguji coba kesiapan (readiness) REDD+ di Sulawesi Tengah. Untuk menandai penetapan Sulawesi Tengah secara resmi sebagai provinsi demonstrasi, UN-REDD Programme Indonesia mengadakan acara peluncuran (launching) dan Workshop UN-REDD Programme yang dilaksanakan bersamaan dengan

penyelenggaraan Konsultasi Regional Strategi Nasional (Stranas) REDD+ di Palu pada tanggal 13-15 Oktober 2010.

Acara peluncuran di Palu (13/10) tersebut ikut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kementerian Kehutanan, UN Resident Coordinator, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dan peserta dari kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan provinsi-provinsi lainnya di Sulawesi. Acara ini juga meliputi jumpa pers yang dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Kepala Balai Litbang Kementerian Kehutanan, UN Representative, dan UNODC.

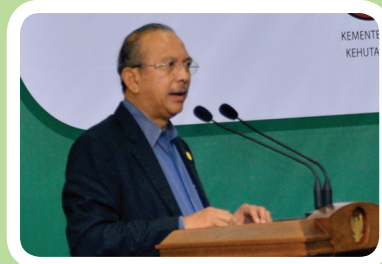


Kata Mereka



Wakil Menteri BPN/Wakil Kepala Bappenas:

"Kementerian PPN/Bappenas sebagai koordinator penyusunan rancangan Strategi Nasional REDD+ mengucapkan terima kasih kepada ... UN-REDD ... yang selama ini telah bekerja keras untuk menyelesaikan rancangan (Stranas REDD+) ini."



Deputi I Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Heru Prasetyo:

"Saya ingin memberi apresiasi yang besar kepada proses yang telah dijalankan. Saya bayangkan, kalau kita melakukan proses seperti yang dilakukan dalam proses REDD+ strategy, *the same consultative approach, we will be much better served.*"



Mina Setra (AMAN):

"Saya ingin memberikan apresiasi karena dari keikutsertaan saya dalam konsultasi regional dukungan UN-REDD Programme Indonesia, banyak masukan yang diberikan pada saat konsultasi regional mendapat tempat di dalam Rancangan Stranas REDD+."

Kabar Program UN-REDD Indonesia

REDD+ Retreat

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan UN-REDD Programme Indonesia mengadakan acara REDD+ Retreat di Kalimantan Timur dengan mengundang perwakilan negara-negara sahabat dan donor di Jakarta, organisasi-organisasi internasional, dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam persiapan REDD+(18-20/11).

Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan perkembangan implementasi REDD+ di dalam negeri dengan perkembangan REDD+ di tingkat internasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut dengan dukungan UN-REDD Programme Indonesia itu meliputi kunjungan ke hutan untuk meninjau dampak-dampak deforestasi dan degradasi hutan, serta berbagai kegiatan pemanfaatan hutan, konservasi, dan rehabilitasi lahan.

Selama tiga hari, peserta diajak melihat berbagai prakarsa yang mendukung kegiatan REDD+ di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Dari kunjungan itu terlihat bahwa sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat memiliki motivasi yang cukup tinggi untuk menyelamatkan hutan Indonesia. Perjalanan dimulai di PT Kitadin, Samarinda, berlanjut ke pusat penangkaran orangutan milik The Borneo Orangutan Foundation, kemudian PT ITCI Hutani Manunggal, dan Hutan Wisata Bukit Bangkirai. Di hari terakhir, berlangsung diskusi tentang kemajuan terakhir pelaksanaan REDD+ di Indonesia yang diadakan di Hotel Senyur, Balikpapan. Hasil diskusi tersebut semakin memperkuat dukungan dunia internasional terhadap pelaksanaan kegiatan REDD+ di Indonesia.

Publikasi Terbaru

- Jalan Panjang Penataan Kembali Kebijakan Kehutanan di Indonesia, Catatan Proses Penyusunan Rancangan Stranas REDD+ Indonesia
- Greening Earth Canopy for Bluer Sky, Indonesia's Strategy for Reducing Emission from Deforestation and Degradation+ (REDD+)

Hubungi kami :

Gedung Manggala Wanabakti
Blok IV, Lantai 5, Ruang 525C
Jalan Jenderal Gatot Subroto
Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5795 1505
Faks: +62 21 574 6748

Atau silakan kirim email ke :

nanda.febriani@un-redd.or.id

Kerja sama antara:



UN-REDD
PROGRAMME
The United Nations Collaborative Programme
on Reducing Emissions from Deforestation and
Forest Degradation in Developing Countries

